

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil uji yang telah dilakukan dapat disimpulkan sebagai berikut:

Berdasarkan hasil uji yang telah dilakukan dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Desentralisasi Fiskal memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Ketimpangan Kab/Kota di Teluk Tomini. Artinya setiap peningkatan Desentralisasi Fiskal Penerimaan dapat mengurangi Ketimpangan Kab/Kota di KawasanTelukTomini.
2. Pajak Daerah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Ketimpangan Kab/Kota di Teluk Tomini. Artinya setiap peningkatan Pajak Daerah maka akan meningkatkan Ketimpangan Kab/Kota di Kawasan Teluk Tomini.
3. Belanja Langsung memiliki pengaruh negative dan signifikan terhadap Ketimpangan. Artinya Setiap peningkatan Belanja Langsung maka akan mengurangi Ketimpangan Kab/Kota di KawasanTeluk Tomini.
4. Belanja Tidak Langsung memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Ketimpangan Kab/Kota di Teluk Tomini. Artinya setiap peningkatan Belanja Tidak Langsung maka akan meningkatkan Ketimpangan Kab/Kota di KawasanTeluk Tomini.

5.2 Saran

Saran yang diajukan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah Kabupaten/Kota di Teluk Tomini diharapkan mampu meningkatkan potensi tiap-tiap daerah dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal secara adil dan merata, agar dapat mengurangi tingkat ketimpangan.
2. Pemerintah Kabupaten/Kota di Teluk Tomini diharapkan bisa memberikan bantuan-bantuan sosial bagi masyarakat miskin seperti bantuan modal untuk keberlangsungan aktivitas ekonomi masyarakat dengan mengalokasikan belanja pemerintah secara adil demi mengurangi ketimpangan di Teluk Tomoni.
3. Pemerintah Kab/Kota di Teluk Tomini perlu meningkatkan efektivitas pelaksanaan belanja infrastruktur dan memperluas pembangunan sampai ke pelosok daerah agar dampak dari belanja infrastruktur dapat dirasakan oleh semua masyarakat yang berada di Teluk Tomini.

DaftarPustaka

- Altito R Siagian. (2010). *Dampak Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah dan Ketimpangan Wilayah (Studi Kasus Propinsi Jawa Barat)*. Universitas Diponegoro.
- Apriesa, L. F., & Miyasto, M. (2013). Pengaruh desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dan ketimpangan pendapatan (Studi Kasus: Kabupaten/Kota di Jawa Tengah). *Diponegoro Journal of Economics*, 2(1), 98–109.
- Arham, M. A. (2013). *Regulasi Kebijakan Ekonomi dan Dampaknya terhadap Perekonomian Indonesia : Dampak Perubahan UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Perekonomian*. UNG Press.
- Arham, M. A. (2014). Kebijakan Desentralisasi Fiskal, Pergeseran Sektor, dan Ketimpangan Antarkabupaten/Kota di Sulawesi Tengah Fiscal Decentralization Policies, Sectoral Shifts and Inequalities Amongst Regencies/Municipalities in Central Sulawesi. *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan Indonesia, Vol 14(2)*, 145–167.
- Arham, M. A., & Hasan, Y. (2016). *Transfer Dana Desa dan Ketimpangan Distribusi Pendapatan di Indonesia*.
- Badan Pusat statistik. (2020). *Statistik Keuangan Provinsi Gorontalo*.
- Badan Pusat statistik RI. (2019a). *kemiskinan dan ketimpangan tahun 2015-2019*.
- Badan Pusat statistik RI. (2019b). *Produk Domestik Bruto atas dasar Harga Konstan 2015-2019*.
- Bagaswati, N. P. (2017). *Dampak Desentralisasi Fiskal terhadap Ketimpanagn Pembangunan Antar Wilayah Di Pulau Jawa Tahun 2008-2015, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta*.
- Bahl, R. W. (2000). China: Evaluating the impact of intergovernmental fiscal reform. *Fiscal Decentralization in Developing Countries, Cambridge: Cambridge University Press*.
- Bonet, J. (2006). Fiscal decentralization and regional income disparities: evidence from the Colombian experience. *The Annals of Regional Science, Vol 40(3)*, 661–676.
- Dewi Rosdyana, E.Susy Suhendra, dan R. P. (2015). Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah Dan Ketimpangan Pendapatan Di Pulau Jawa Tahun 2009-2013. *Prosiding PESAT (Psikologi, Ekonomi, Sastra, Arsitektur & Sipil)Vol 6(1)*, 123–132.
- DJPK kemenkeu. (2020). *Realisasi Pendapatan dan Pengeluaran 2015-2019*. Kementerian Keuangan RI. <http://www.djpk.kemenkeu.go.id/>
- Fajri, M., Delis, A., & Amzar, Y. V. (2016). Dampak Otonomi Fiskal, Pertumbuhan Ekonomi, dan Keterbukaan Daerah terhadap Ketimpangan Wilayah di Sumatera. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*.
- Febriana, A. (2015). Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah terhadap Ketimpanagan Regional antar Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh. *Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh*.
- Gulo, A. K., Zamzami, Z., & Bhakti, A. (2017). Dampak alokasi belanja langsung terhadap ketimpangan ekonomi wilayah (Studi kasus Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Jambi, dan Provinsi Bengkulu). *Jurnal Paradigma*

- Ekonomika*, 12(2), 57–66.
- Hamid, E. S. (2005). *Formula alternatif dana alokasi umum (DAU): upaya mengatasi ketimpangan fiskal dalam era otonomi daerah*. UII Press.
- Juvika, N. N. F. (2020). *Pengaruh Pengeluaran Pemerintah, Investasi, dan zakat Terhadap Ketimpangan Pendapatan dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Intervening Di Provinsi Jawa Tengah*.
- Martinez, V. J. M., & McNab, R. (2001). Fiscal decentralization, economic growth, and democratic governance. Working Paper.
- Mutia. (2018). Analisis Pengaruh Desentralisasi Fiskal terhadap Ketimpangan Pembangunan Kabupaten/Kota Seprovinsi Sumatera Utara. *Universitas Sumatra Utara*.
- Priutami, H. (2017). *Analisis Peran Pajak Dalam Mengatasi Masalah Ketimpangan Pendapatan Di Indonesia (Studi Atas: Pendekatan Redistribusi Pendapatan di Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) dan Center for Infonesia Taxation Analysis (CITA)*. Universitas Brawijaya.
- Putri, N., & Suardhika, N. I. K. (2014). Pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan belanja modal terhadap ketimpangan distribusi pendapatan. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*, 4(1), 41–49.
- Qiao, B., Martinez-Vazquez, J., & Xu, Y. (2002). *Growth and equity tradeoff in decentralization policy: China's experience*. International Center for Public Policy, Andrew Young School of Policy.
- Sasana, H. (2009). Analisis Dampak Pertumbuhan Ekonomi, Kesenjangan Antar Daerah Dan Tenaga Kerja Terserap Terhadap Kesejahteraan Di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Dalam Era Desentralisasi Fiskal. *Jurnal Bisnis Dan Ekonomi*, Vol 16(01), 1-69.
- Sianturi, Y Simonsen, M. (2011). *Dampak Desentralisasi Fiskal terhadap ketimpangan pendapatan antar wilayah (studi kasus Kab/Kota Sumatra Utara*. Fakultas Ekonomi. Universitas Diponegoro. Universitas Diponegoro.
- Sjafrizal. (2012). *Ekonomi Wilayah dan Perkotaan*. PT Raja Grafindo Persada.
- Sjafrizal, & Elfindri. (2008). *Ekonomi regional: Teori dan aplikasi*. Baduouse Media.
- Suwanan, A. F., & Sulistiani, E. H. (2009). Fiscal decentralization and regional disparities in Indonesia: A dynamic panel data evidence. *Journal of Indonesian Economy and Business*, Vol 24(3), 328–336.
- Syahpuri, A. R. (2016). *Analisis Ketimpangan Ekonomi dan Pengaruhnya terhadap Tingkat Kriminalitas di Propinsi Sumatera Utara*.
- Todaro, M. P. (2000). *Economic Development New York Addition Wesley Longman*. Inc.
- Tulus T.H. Tambunan. (2018). *Perekonomian Indonesia, 1965-2018 : Kemiskinan dan akaesenjangan Pendapatan*. Ghalia Indonesia.
- Tulus T.H. Tambunan. (2003). *Perekonomian Indonesia: beberapa permasalahan penting*. Ghalia Indonesia.